

Petunjuk A: Pilih satu jawaban yang paling tepat

1. Usul pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan... memeriksa, mengadili, dan memu-tuskan pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melanggar hukum dan sebagainya.
 - A. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi
 - B. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung
 - C. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
 - D. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi dan MPR
 - E. terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung dan MPR
2. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang menyatakan negara RI menganut sistem konstitusional bahwa kekuasaan tertinggi di tangan...
 - A. MPR
 - B. DPR dan MPR
 - C. MPR dan DPD
 - D. Rakyat
 - E. Rakyat dan MPR
3. Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan...

A. Kekuasaan	D. Rechstaat
B. Federal	E. Republik
C. Monarki	
4. Perhatikan pilihan berikut.
 1. Rancangan pernyataan Indonesia merdeka
 2. Rancangan Pembukaan UUD 1945
 3. Rancangan Pasal-pasal UUD 1945
 Hasil sidang BPUPKI adalah...
 - A. 1
 - B. 1 dan 2
 - C. 2 dan 3
 - D. 1, 2, dan 3
 - E. 1, 2, dan 3 salah
5. Rapat terakhir sebelum diumum-kannya kemerdekaan Indonesia, berlangsung di rumah...
 - A. Laksamana Maeda
 - B. Lukmanusa Kiring
 - C. Sayuti Melik
 - D. Muhammad Hatta
 - E. Soekarno
6. Setelah BPUPKI selesai melak-sanakan tugasnya yaitu merancang UUD 1945 berikut rancangan dasar negara dan rancangan pernyataan

- Indonesia merdeka, maka dibentuklah PPKI pada tanggal...
- 6 Agustus 1945
 - 7 Agustus 1945
 - 8 Agustus 1945
 - 14 Agustus 1945
 - 15 Agustus 1945
7. BPUPKI yang bertugas menyusun Dasar Indonesia Merdeka (Undang-Undang Dasar) diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan didampingi seorang Ketua Muda bernama...
- R.P. Soeroso
 - Muhammad Hatta
 - Wahid Hasyim
 - Abikusno Tjokrosujoso
 - H. Agus Salim
8. Atas janji perdana menteri Jepang pada tanggal 7 September 1944, maka dibentuklah sebuah badan bernama Dokuritsu Zyunbi Choosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI) pada tanggal...
- 29 April 1945
 - 19 April 1945
 - 28 Mei 1945
 - 19 April 1945
 - 1 Mei 1945
9. Perdana Menteri Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia melalui ucapannya pada 7 September 1944 adalah...
- Koiso
 - Taro
 - Takasimoto
 - Hiro
 - Aso
10. Contoh konvensi yang masih terpelihara hingga saat ini dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia hingga saat ini adalah...
- Pidato akhir tahun Presiden RI
 - Pidato kenegaraan 16 Agustus
 - Pidato dalam pembukaan acara resmi
 - Pidato mengenai suatu masalah hukum
 - Keputusan Presiden
11. Aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penye-lenggaraan ketatanegaraan disebut...
- konvensi
 - dokrit
 - doktrin
 - Perpu
 - Kepres
12. Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa urutan ketiga dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah...
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Peraturan Presiden
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - Peraturan Pemerintah
 - Peraturan Daerah
13. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi...
- Norma
 - Norma dan aturan

- C. Norma dan hukum adat
 D. Norma dan sanksi
 E. Aturan-aturan
14. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat...
- A. kontrol D. pengawasan
 B. legislasi E. hukum
 C. alokasi
15. Menurut amendemen keempat UUD 1945 dinyatakan bahwa... tidak lagi merupakan kesatuan UUD 1945.
- A. Aturan Tambahan
 B. Aturan Peralihan
 C. Peraturan Pemerintah
 D. Penjelasan
 E. Rumusan Pancasila
16. Sebagaimana kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 itu telah ditetapkan oleh...
- A. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.
 B. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.
 C. PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.
 D. BPUPKI dan mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.
 E. PPKI dan mulai berlaku pada tanggal 29 April 1949.
17. UUD 1945 untuk pertama kalinya diberlakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Naskahnya pertama kali dimuat secara resmi dalam Berita Negara, yaitu...
- A. Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946
 B. Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1945
 C. Berita Republik Indonesia Tahun II No.17 tanggal 15 Februari 1946
 D. Berita Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1949
 E. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun II No.7 tanggal 15 Februari 1946
18. Berikut ini adalah sebab-sebab perlunya amandemen atas UUD 1945, kecuali...
- A. UUD 1945 bersifat singkat
 B. UUD 1945 bersifat multitafsir
 C. UUD 1945 percaya pada semangat penyelenggara negara
 D. UUD 1945 bersifat luwes
 E. UUD 1945 bersifat sementara
19. Sebagai hukum dasar tertulis, UUD 1945 mengikat Pemerintah, Lembaga Negara, Lembaga Masyarakat, setiap Warga Negara Indonesia, dan...
- A. setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia
 B. setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia

- C. setiap orang yang ada di Indonesia kecuali *Corps Diplomatic*
- D. setiap penduduk dan warga negara asing yang tinggal minimal 5 tahun
- E. setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia dan orang asing yang telah tinggal lebih dari 20 tahun
20. Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental, karena memuat berbagai unsur mutlak, *kecuali...*
- A. Sistem pemerintahan
- B. Dasar falsafah negara
- C. Bentuk negara
- D. Tujuan negara
- E. Ketentuan diadakannya UUD negara
21. Konstitusi Republik Indonesia Serikat disetujui semua pihak pada saat berlangsungnya...
- A. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda
- B. Perjanjian Linggar Jati di Kuningan, Jawa Barat
- C. Perjanjian Renville
- D. Perjanjian Malino di Sulawesi Selatan
- E. Sidang Umum PBB
22. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak berlaku di salah satu ibukota provinsi di Indonesia, yaitu...
- A. Aceh
- B. Sumatera Barat
- C. Kalimantan Tengah
- D. Jogjakarta
- E. Irian Jaya
23. Dalam kurun waktu 1945—1949, di Indonesia terjadi perubahan sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parleментар melalui suatu maklumat yang dikeluarkan pada tanggal...
- A. 14 November 1947
- B. 24 November 1949
- C. 14 November 1945
- D. 14 November 1949
- E. 18 November 1949
24. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) berlaku di Indonesia sejak tanggal...
- A. 17 Agustus 1950—5 Juli 1959
- B. 17 Agustus 1949—5 Juni 1959
- C. 17 Agustus 1950—15 Juli 1955
- D. 27 Agustus 1950—5 Juli 1959
- E. 17 Agustus 1950—15 Agustus 1959
25. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) di Indonesia berlaku mulai tanggal...
- A. 27 Desember 1949—17 Agustus 1950
- B. 27 Desember 1949—17 Agustus 1959
- C. 27 Desember 1949—5 Juli 1959
- D. 17 Desember 1949—17 Agustus 1950
- E. 7 Desember 1949—17 Agustus 1950
26. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, yaitu...

- A. Agama, Kehakiman dan HAM, Pertahanan, dan Luar Negeri
- B. Kehakiman dan HAM, Pertahanan, Luar Negeri, dan Pendidikan
- C. Pendidikan, Pertahanan, Agama, dan Luar Negeri
- D. Luar Negeri, Agama, Kehakiman dan HAM, dan Pendidikan
- E. Perdagangan, Kehakiman dan HAM, Pertahanan, dan Luar Negeri

27. Perhatikan pernyataan berikut!

1. Merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. Sebagai pelaksana fungsi auditif, operatif, rekomendasi, yudikatif.
3. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
4. Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden.
5. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota.

Manakah dari kelima pernyataan di atas yang merupakan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

- A. 1, 2, 3, 4, dan 5
- B. 2, 3, 4, dan 5
- C. 1, 3, 4, dan 5

D. 3, 4, dan 5

E. 1, 3, 4, dan 5

28. Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK), *kecuali*...

- A. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- B. Susunan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.
- C. Mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung masing-masing sebanyak tiga orang.
- D. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
- E. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

29. Perhatikanlah pernyataan berikut!

1. Bersifat mandiri.
2. Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
3. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.
4. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung.
5. Memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Manakah yang merupakan kedudukan Komisi Yudisial (KY) RI?

- A. 1, 2, dan 3 D. 1, 3, dan 5
 B. 1, 2, dan 4 E. 4 dan 5
 C. 1, 3, dan 4

30. Perhatikanlah pernyataan berikut!

1. Sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua peradilan terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh pengaruh lainnya.
2. Susunan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang.
3. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.
5. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung diatur dalam undang-undang.

Manakah dari pernyataan di atas yang merupakan kedudukan Mahkamah Agung?

- A. 1, 2, 3, dan 4
 B. 1, 2, 4, dan 5
 C. 2, 3, 4, dan 5
 D. 1, 2, 3, 4, dan 5
 E. 1, 3, 4, dan 5

31. Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?

- A. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
 B. Anggota DPD tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden.
 C. Jumlah anggota DPD di setiap provinsi sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR.
 D. Seluruh anggota DPD adalah anggota MPR.
 E. Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

32. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak, *kecuali*...

- A. Mengajukan usul RUU
 B. Mengajukan pertanyaan
 C. Menyampaikan usul dan pendapat
 D. Imunitas
 E. Interpelasi

33. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai hak-hak, yaitu...

- A. interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
 B. interpelasi, angket, dan imunitas
 C. menyatakan pendapat, angket, dan imunitas
 D. mengajukan pertanyaan, angket, dan interpelasi
 E. angket, interpelasi, dan imunitas

34. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu...
- legislasi, konstitutif, dan pengawasan
 - anggaran, legislasi, dan legislatif
 - legislasi, anggaran, dan pengawasan
 - anggaran, pengawasan, dan konstitutif
 - konstitutif, legislatif, dan anggaran
35. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki beberapa kedudukan sebagai berikut, *kecuali*...
- Sebagai pelaksana fungsi konstitutif
 - Susunannya diatur dalam undang-undang
 - Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum
 - Seluruh anggota DPR adalah anggota MPR
 - DPR tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh Presiden
36. Di bawah ini tugas dan wewenang Presiden RI sebagai Kepala Negara, *kecuali*...
- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
 - Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional dengan negara lain
 - Menyatakan keadaan bahaya, yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang
 - Dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain
 - Menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar
37. Tugas dan wewenang Presiden RI selaku Kepala Pemerintahan (fungsi eksekutif dan fungsi legislatif), *kecuali*...
- Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
 - Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
 - Mengajukan dan membahas rancangan undang-undang bersama DPR
 - Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
 - Mengajukan dan membahas usul RAPBN bersama DPR
38. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut, anggota MPR mempunyai hak-hak sebagai berikut, *kecuali*...
- Mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR

- B. Menyatakan pendapat
 C. Membela diri
 D. Imunitas
 E. Protokoler
39. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan susunan keanggotaan terdiri dari anggota DPR dan DPD hasil pemilihan umum, memiliki kedudukan sebagai...
- A. lembaga negara dan pelaksana fungsi kontrol
 B. lembaga negara dan pelaksana fungsi konstitutif
 C. lembaga negara dan pelaksana fungsi legislasi
 D. lembaga negara dan pelaksana fungsi amandemen
 E. lembaga negara dan pelaksana fungsi pengawasan
40. Kelembagaan negara merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara adalah...
- A. MPR, Presiden, DPR, Watimpres, MA, MK, dan BPK
 B. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK
 C. MPR, Presiden, DPR, MA, MK, DPA, dan BPK
 D. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan DPA
 E. MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, dan Watimpres
41. Jaminan mengenai hak asasi anak dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diatur dalam...
- A. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945
 B. Pasal 28A UUD 1945
 C. Pasal 28C ayat 1 dan 2 UUD 1945
 D. Pasal 28D ayat 1 UUD 1945
 E. Pasal 28F UUD 1945
42. Dalam isi UUD 1945 setelah diamandemen 4 kali, lembaga kepresidenan diatur dalam pasal...
- A. 2 dan 3 D. 19—22D
 B. 4—16 E. 22C—22D
 C. 18—18B
43. Identitas nasional Indonesia telah diatur di dalam UUD 1945, yaitu...
- A. Pasal 31 dan 32
 B. Pasal 33 dan 34
 C. Pasal 35 dan 36
 D. Pasal 36 dan 37
 E. Pasal 30 dan 31
44. Sistem pemerintahan parlementer berlangsung di Indonesia pada periode...
- A. UU Proklamasi 1945
 B. Masa Konstitusi RIS
 C. Masa UUDS 1950
 D. UUD 1945
 E. Orde baru
45. Berikut merupakan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 Tahun 2004, *kecuali*...
- A. TAP MPR

- B. Perpu
C. Pepres
D. Peraturan Daerah
E. B, C, dan D benar
46. Indonesia menganut Demokrasi Liberal pada masa...
A. Konsitusi RIS
B. UUD 1945 kurun waktu pertama
C. UUDS 1950
D. UUD 1945 kurun waktu kedua
E. UUD 1945 amandemen kedua
47. Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dilakukan pada saat amandemen UUD 1945 yang...
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
48. Adanya lembaga baru yaitu DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 yang...
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
49. Tahun 2002 dalam Sidang Tahunan ditetapkan perubahan UUD keempat. Adapun perubahan-perubahan yang mendasar mengenai MPR adalah...
A. Susunan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD.
B. MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat.
C. MPR tidak lagi menetapkan GBHN.
D. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara.
E. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.
50. Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang Presiden adalah...
A. Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih langsung oleh rakyat.
B. Presiden dan atau Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya.
C. Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan DPR dan DPD atas usul MPR berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi.
D. Presiden tidak dapat membekukan dan membubarkan DPR.
E. Presiden mengangkat Ketua DPD, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
51. Pada tahun 2001, MPR dalam Sidang Tahunan tahun 2001 ditetapkan perubahan ketiga atas UUD 1945. Dalam amandemen ini, perubahan yang sangat mendasar tentang MPR, kecuali...
A. MPR tidak lagi memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat.
B. MPR tidak lagi menetapkan GBHN.

- C. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara
- D. MPR tidak lagi memilih Presiden dan Wakil Presiden, tetapi hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.
- E. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah Agung.
52. Dalam Sidang Tahunan tahun 2000 diadakan perubahan kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, dan dalam amandemen ini ditegaskan tentang...
- A. Fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan). Untuk melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak-hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- B. Penyempurnaan pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, penyempurnaan pasal 28 ditambah pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- C. Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyempurnaan pasal 30 tentang Pertahanan Keamanan.
- D. A, B, dan C benar.
- E. Hanya A dan C yang benar.
53. Amandemen UUD 1945 pertama ditetapkan pada tanggal...
- A. 14 Oktober 1999
- B. 17 Oktober 1999
- C. 19 Oktober 1999
- D. 21 Oktober 1999
- E. 22 Oktober 1999
54. Pada tanggal 14 Oktober sampai dengan 22 Oktober 1999 diadakan sidang umum MPR hasil pemilu 7 Juni 1999 salah satunya menetapkan perubahan pertama UUD 1945. Perubahan penting dalam amandemen pertama yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999 adalah...
- A. dibatasinya masa jabatan Presiden paling banyak 2 masa jabatan
- B. ditegaskannya tentang fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan)
- C. bahwa pemegang kekuasaan pembentuk UU adalah DPR, bukan lagi Presiden
- D. A dan B benar
- E. A dan C benar
55. Sidang MPRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tetap sampai terpilihnya hasil pemilu dengan ketetapan...
- A. (TAP MPRS No.XLIII/MPRS/1968)
- B. (TAP MPRS No.XLIV/MPRS/1968)
- C. (TAP MPRS No.XLV/MPRS/1968)
- D. (TAP MPRS No.XLVI/MPRS/1968)
- E. (TAP MPRS No.XLVII/MPRS/1968)

56. Sidang MPRS pada tahun 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia dengan ketetapan...
- (TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967)
 - (TAP MPRS No.XXXIV/MPRS/1967)
 - (TAP MPRS No.XXXV/MPRS/1967)
 - (TAP MPRS No.XXXVI/MPRS/1967)
 - (TAP MPRS No.XXXVII/MPRS/1967)
57. Perhatikanlah pernyataan berikut!
- Bubarkan PKI
 - Turunkan Presiden Soekarno
 - Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI
 - Turunkan harga-harga/perbaiki ekonomi
 - Laksanakan Pemilihan Umum Dengan dipelopori oleh pemuda/mahasiswa, rakyat menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA), yaitu...
- 1, 2, dan 3
 - 2, 3, dan 4
 - 1, 3, dan 4
 - 1, 2, 3, dan 4
 - 3, 4, dan 5
58. Dalam kurun waktu berlakunya UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, telah terjadi pergantian kabinet karena dijatuhkan DPR sebanyak...
- 5 (lima) kali
 - 6 (enam) kali
 - 7 (tujuh) kali
 - 8 (delapan) kali
 - 17 (tujuh belas) kali
59. UUDS 1950 menganut sistem Kabinet Parleментар, artinya...
- Presiden tidak memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden sekadar "konstitusional" belaka. Kekuasaan pemerintah di tangan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
 - Para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri bertanggung jawab kepada DPR/Parlemen.
 - Para menteri yang dipimpin oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada DPR/Parlemen.
 - Menganut Landasan Demokrasi Liberal UUDS yang mengutamakan kebebasan individu.
 - Pilihan A, B, dan D benar
60. Pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), posisi Presiden adalah sebagai...
- Kepala Negara dan Pemimpin Menteri
 - Kepala Pemerintahan
 - Kepala Negara dan Pemerintahan
 - Pemimpin Menteri
 - Kepala Negara

Kunci Jawaban Tes Kemampuan Dasar

Paket
1

PANCASILA

1. E	21. A	41. A
2. E	22. D	42. C
3. D	23. E	43. B
4. E	24. C	44. A
5. E	25. A	45. E
6. D	26. C	46. D
7. C	27. B	47. A
8. C	28. A	48. C
9. C	29. A	49. D
10. B	30. C	50. C
11. A	31. E	51. A
12. D	32. B	52. E
13. E	33. B	53. C
14. B	34. A	54. B
15. C	35. E	55. D
16. C	36. C	56. E
17. E	37. E	57. B
18. C	38. B	58. C
19. C	39. E	59. B
20. B	40. D	60. C

Paket
2

UUD 1945

1. A	21. A	41. A
2. D	22. D	42. B
3. A	23. C	43. C
4. D	24. A	44. C
5. A	25. A	45. A
6. B	26. A	46. C
7. A	27. A	47. D
8. A	28. E	48. C
9. A	29. A	49. A
10. B	30. D	50. D
11. A	31. B	51. E
12. D	32. E	52. D
13. B	33. A	53. C
14. A	34. C	54. E
15. D	35. A	55. B
16. A	36. E	56. A
17. A	37. A	57. C
18. A	38. D	58. C
19. A	39. B	59. E
20. B	40. B	60. E

Paket
3

TATA NEGARA

1. E	19. A	37. C	55. A	73. E	91. A	109. E
2. A	20. C	38. A	56. E	74. C	92. A	110. B
3. E	21. E	39. C	57. F	75. D	93. E	111. C
4. E	22. A	40. A	58. A	76. A	94. D	112. A
5. D	23. B	41. A	59. E	77. E	95. C	113. A
6. A	24. C	42. E	60. D	78. E	96. A	114. E
7. E	25. A	43. E	61. E	79. A	97. E	115. E
8. C	26. E	44. E	62. E	80. D	98. A	116. A
9. D	27. E	45. B	63. E	81. B	99. A	117. A
10. A	28. A	46. E	64. E	82. E	100. A	118. A
11. E	29. C	47. A	65. E	83. B	101. E	119. C
12. A	30. A	48. A	66. A	84. D	102. A	120. C
13. B	31. A	49. A	67. A	85. A	103. C	
14. E	32. B	50. E	68. A	86. A	104. A	
15. E	33. A	51. C	69. E	87. C	105. C	
16. A	34. A	52. E	70. E	88. D	106. A	
17. A	35. D	53. B	71. A	89. B	107. E	
18. E	36. A	54. B	72. E	90. A	108. C	